

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, N. L. P. O., & Yuliana, L. (2016). *Analisis Determinan Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Widya*, 3(3), 140–146
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2021. *Belanja Modal*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-dimaksud-dengan-belanja-modal>. diakses pada tanggal 17 April 2021
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2021. *Catatan Berita Transfer Daerah Tersendat*. <https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Catatan-Berita-Transfer-DBH-Tersendat.pdf>. diakses pada tanggal 22 Maret 2021
- Ernayani, R. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013)*. *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234>
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivriate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam dan Dwi Ratmono. 2017. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Harahap, R. U. (2011). *Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia pada kab./kota propinsi sumatera utara*. 11(1), 47–58.
- Heliyanto, F. dan N. H. (2016). *Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(3), 1–17.
- Hukum, S., Provinsi, P., & Selatan, S. (2018). *SILPA Tutupi Defisit Pemkot Palembang*. 2018–2020.
- Laraspati, Angga. 2020. “*Laporkan APBD TA 2019, Pemprov Sumsel Umumkan Nilai Aset Naik 12,90%*”, <https://news.detik.com/berita/d-5082714/laporkan-apbd-ta-2019-pemprov-sumsel-umumkan-nilai-aset-naik-1290>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021.

- Maulina, I., Nadirsyah, & Darwanis. (2017). *Pengaruh Sisa Lebih Anggaran Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perubahan Belanja Modal Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2013-2015*. *Jurnal Ekonomi Manajemen & Bisnis* -, 18(2), 191–196.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2015 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/Pmk.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2015 Tentang Klasifikasi Anggaran.
- Praptoyo, I. S. F. dan S. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Timur*. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(9), 1–22.
- Priyatno, Duwi. 2012. *Cara Kiat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: ANDI.
- Rachmawati, M. (2016). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat)*. *Akuntansi*, 1–

11.

Rahmaliyah. 2019. “*Kucuran DAK Sumsel Meningkatkan signifikan. Sebelumnya ‘Hanya’ Berkisar 50 Miliar*”, <https://palembang.tribunnews.com/2019/10/22/kucuran-dak-sumsel-meningkat-signifikan-sebelumnya-hanya-berkisar-rp-50-miliar>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021.

Sofwan, Syifa Vydia dan Octaviyanti, Susi. 2020. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Periode 2010-2018*. Bandung: Universitas Bale Bandung.

Solikin, A. (2016). *Analisis Flypaper Effect Pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Tahun 2012-2014)*. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 16(1), 11. <https://doi.org/10.20961/jab.v16i1.187>

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta

Syarifin, P. dan Jubaedah, D. 2005. *Pemerintah Daerah di Indonesia*. CV Pustaka Setia. Bandung.

Tolok, Aprianus Doni. 2020. “*Realisasi Belanja Modal Banyak Provinsi Rendah, Jokowi: Hati-Hati!*”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200716/15/1266841/realisasi-belanja-modal-banyak-provinsi-rendah-jokowi-hati-hati>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang *Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*

Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.